

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP
PENGELOLAAN KEUANGAN PADA DESA MALEO
KECAMATAN PAGUAT KABUPATEN
POHuwato**

Oleh :

**SASMITA S GELI
NIM : E21 19 208**

SKRIPSI



Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana

**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP
PENGELOLAAN KEUANGAN PADA DESA MALEO
KECAMATAN PAGUAT KABUPATEN
POHuwato**

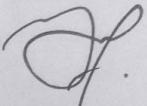
Oleh

SASMITA S. GELI
E2119208

S K R I P S I

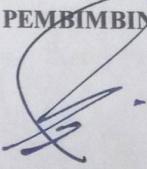
**Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dan telah disetujui
oleh Tim Pembimbing pada tanggal
Gorontalo, 16 Juni 2022**

PEMBIMBING I



TAMSIR, SE., MM
NIDN.0920057403

PEMBIMBING II



HARIS HASAN, SE., MM
NIDN.0908108407

HALAMAN PERSETUJUAN

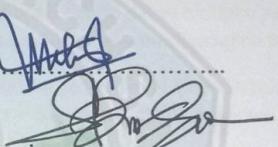
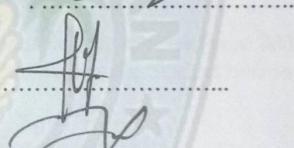
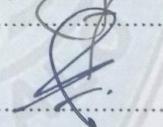
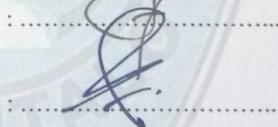
**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP
PENGELOLAAN KEUANGAN PADA DESA MALEO
KECAMATAN PAGUAT KABUPATEN
POHuwato**

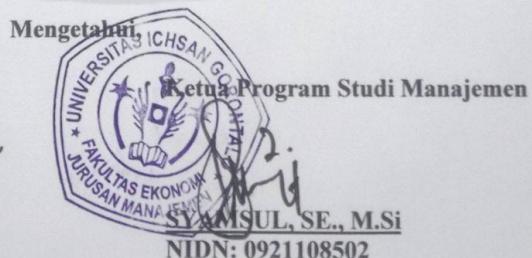
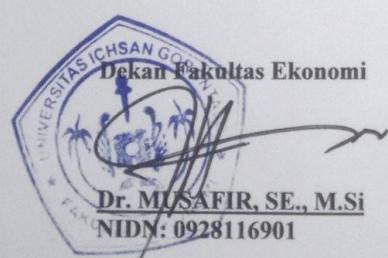
OLEH:

SASMITA S. GELI

E2119208

Diperiksa Oleh Dewan Penguji Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo

1. Muhammad Anas, SE., MM
(Ketua Penguji) 
2. Sri Dayani Ismail, SE., MM
(Anggota Penguji) 
3. Ng. Syamsiah B, SE., MM
(Anggota Penguji) 
4. Tamsir, SE., MM
(Pembimbing Utama) 
5. Haris Hasan, SE., MM
(Pembimbing Pendamping) 



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Gorontalo, 16 Juni 2022
Yang membuat pernyataan



Sasmita S. Geli
NIM: E2119208

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan pada Desa Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato.”, sesuai dengan yang direncanakan. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian Skripsi. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

- Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Ichsan Gorontalo (YPIPT-IG).
- Bapak Dr. H. Abdul Gaffar Latjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
- Bapak Dr. Musafir, SE, M.Si selaku Dekan di Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan (UNISAN) Gorontalo.
- Bapak Syamsul, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen Universitas Ichsan (UNISAN) Gorontalo.
- Bapak Tamsir, SE., MM selaku pembimbing I, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan Skripsi ini.
- Bapak Haris Hasan, SE., MM, selaku pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan Skripsi ini.

- Bapak Ram Botutihe, selaku Kepala Desa Maleo Kecamatan Paguat, yang telah membantu penulis selama pengambilan data di lapangan.
- Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam mengerjakan Skripsi ini.
- Ucapan terima kasih kepada kedua orang tuaku dan keluarga yang telah membantu/mendukung penulis selama penyusunan usulan peneltian ini.
- Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan serta bantuan selama penyusunan usulan peneltian ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini jauh dari sempurna, jika terdapat kelebihan dalam Skripsi ini, maka semua datangnya dari Saran dan kritik, penulis harapkan dari dewan penguji dan semua pihak untuk penyempurnaan penulisan skripsi lebih lanjut. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo, Mei 2022

(**Penulis**)

ABSTRACT

SASMITA S GELI. E2119208. THE EFFECT OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM ON THE FINANCIAL MANAGEMENT AT MALEO VILLAGE, PAGUAT SUBDISTRICT, POHuwATO DISTRICT

The role of the internal control system is very important to create an efficient, effective, and reliable government. The purpose of this study is to find and analyze the effect of the internal control system on the financial management at Maleo Village, Paguat Subdistrict, Pohuwato District. Based on the results of data processing using SPSS-16, it is found that the gained F count is $4,458 > \text{sig. of } 0.049$. It means that the effect of the internal control system (X) on the village financial management at the village (Y) of Maleo village, Paguat Subdistrict, Pohuwato District is significant by 4.458.

Keywords: *internal control system, village financial management*

ABSTRAK

SASMITA S GELI. E2119208. PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN PADA DESA MALEO KECAMATAN PAGUAT KABUPATEN POHuwATO

Peranan dari sistem pengendalian internal sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif dan handal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan pada Desa Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato. Dari hasil olahan data, dengan menggunakan SPSS-16 dapat diperoleh F hitung sebesar $4,458 > \text{sig.}$ sebesar 0,049 yang artinya hubungan antara sistem pengendalian internal (X) terhadap pengelolaan keuangan desa pada desa (Y) Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato sebesar 4,458 adalah signifikan.

Kata kunci: sistem pengendalian internal, pengelolaan keuangan desa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1. Maksud Penelitian	4
1.3.2. Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Desa	6

2.1.1. Pengertian Desa	6
2.1.2. Pemerintah Desa	7
2.1.3. Otonomi Desa	8
2.2. Sistem Pengndalian Internal	11
2.2.1. Pengertian Sistem Pengndalian Internal	11
2.2.2. Tujuan Pengendalian Internal	12
2.2.3. Komponen Pengendalian Internal	13
2.2.4. Unsur Pengendalian Internal	14
2.2.5. Indikator-Indikator Sistem Pengendalian Internal	16
2.3. Pengelolaan Keuangan Desa	19
2.3.1. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa	19
2.3.2. Asas Pengelolaan Keuangan Desa	27
2.4. Kerangka Pikir	30
2.5. Hipotesis	30
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	31
3.1. Objek Penelitian.....	31
3.2. Metode Penelitian	31
3.2.1. Desain Penelitian	31
3.2.2. Defenisi Operasional Penelitian	32
3.2.3. Populasi dan Sampel	33
3.2.4. Teknik Pengumpulan Data	33
3.2.5. Teknik Analisis Data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
4.2. Hasil Penelitian dan Analisis Deskriptif	38
4.2.1. Analisis Deskriptif Variabel SPI (X)	39
4.2.2. Analisis Deskriptif Variabel Pengelolaan Keuangan (Y)	43
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	51
5.1. Kesimpulanan	51
5.2. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pikir	30
Gambar 4.1. Struktur Organisasi	37

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Operasional Variabel Penelitian	32
Tabel 3.2. Skala Likert	34
Tabel 4.1. Rentang Skala Pengukuran Jawaban Responden	38
Tabel 4.2. Tanggapan Responden Pada Variabel SPI X.1-X.3	39
Tabel 4.3. Tanggapan Responden Pada Variabel SPI X.4-X.6	40
Tabel 4.4. Tanggapan Responden Pada Variabel SPI X.7-X.10	41
Tabel 4.5. Rekapan Tanggapan Responden Pada Variabel SPI	42
Tabel 4.6. Tanggapan Responden Pada Variabel Keuangan Desa Y.1-Y.4 ...	43
Tabel 4.7. Tanggapan Responden Pada Variabel Keuangan Desa Y.5-Y.8 ...	44
Tabel 4.8. Tanggapan Responden Pada Variabel Keuangan Desa Y.9-Y.12 .	46
Tabel 4.9. Rekapan Tanggapan Responden Pada Variabel Keuangan Desa ...	47
Tabel 4.10. Coefficients	48
Tabel 4.11. Model Summary	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa secara resmi memberikan wewenang dan kebebasan bagi Desa untuk mengelola pemerintahan dan keuangan sendiri. Setiap desa di Indonesia diberikan dana yang ditransfer langsung dari APBN. Pada tahun 2020 pemerintah menganggarkan anggaran dana Desa sebesar Rp 960,59 juta per desa. Untuk bobot Alokasi Dasar sebesar 69%, Alokasi Afirmasi 1,5%, dan Alokasi Formula 28%, dan Alokasi Kinerja 1,5% (Jakarta, Beritasatu.com). Dana yang diberikan pemerintah kepada Desa sangat besar maka pemerintah perlu memperhatikan kontrol dan pengawasan terhadap dana desa tersebut sehingga tidak terjadi banyak kebocoran dan kecurangan. Upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*) pemerintah desa harus meningkatkan akuntabilitas, transparasi, efisiensi dan efektivitas dalam mengelola keuangan desa.

Dalam menciptakan *good village governance* dibutuhkan sistem pengendalian internal (SPI) yang memadai. Pengendalian internal dalam pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Peranan dari SPI sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif dan handal. Organisasi pemerintahan yang telah memiliki SPI cenderung lebih efektif dan efisien dalam menjalankan organisasi.

Terbukti kelemahan SPI dapat berdampak pada banyaknya laporan yang diterima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang kecurangan dalam mengelola dana Desa.

Pada tahun 2019 ditemukan kurang dari 100 kasus dari total 74.957 desa. Dari 100 kasus tersebut, hanya 67 laporan yang dinyatakan layak dilaporkan ke penegak hukum (Liputan6.com, Jakarta). Peran SPI ialah sebagai alat pemerintah untuk mengontrol kebijakan-kebijakan publik. Kepatuhan aparatur pemerintah desa dalam menjalankan SPI sangat dibutuhkan agar apa yang dicita-citakan dapat terwujud. Peran SPI dalam pemerintahan ialah memberikan landasan untuk akuntabilitas dan pengendalian manajemen dalam menjalankan pemerintahan, mencegah pencurian dan kecurangan, serta meningkatkan trasparansi dan efisiensi (INTOSAI GOV 9100, 2004). Menurut Ionescu (2016) SPI bisa berjalan secara efisien dengan mengutamakan tujuan yaitu perlindungan dana dan anggaran publik, penegakan peraturan dan hukum, pengembangan sistem akuntansi, pencegahan kecurangan dan korupsi, penerapan teknik baru untuk memverifikasi data dan informasi keuangan dalam administrasi publik.

PP No. 60 Tahun 2008, menyatakan bahwa untuk pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, trasparan dan akuntabel. Dalam mendukung PP No. 60 tahun 2008, Presiden RI mengintruksikan agar meningkatkan peran SPI. Intruksi tersebut tertuang dalam Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2014 tentang peningkatan sistem pengendalian intern dan keandalan penyelenggaraan fungsi pengawasan intern dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Isi dari Intruksi Presiden No.9 Tahun 2014 ialah

pemerintah saat ini ingin menpercepat pengimplementasian sistem pengendalian internal disemua sektor dan wilayah agar terciptanya lingkungan pengendalian yang efektif. Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pembinaan serta pengawasan keuangan desa. Pemerintah desa wajib menyajikan laporan keuangan desa sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kewajiban ini menimbulkan banyak permasalahan pada pemerintah desa karena tingkat sumber daya manusia yang ada pada desa belum bisa sepenuhnya menerima SAP.

Melihat tujuan awal dari SPIP yang salah satunya adalah memberikan keyakinan yang memadai terhadap keandalan laporan keuangan, SPIP memiliki dua tujuan dasar yang paling utama yaitu berupa penguatan kualitas akuntabilitas keuangan negara dan bagian utama dari reformasi birokrasi. Salah satu indikator yang menilai kualitas pelaporan keuangan pemerintah dapat tercermin dari opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penyajian laporan keuangan pemerintah. Singkatnya semakin baik implementasi SPIP maka akan memberikan pengaruh positif pada kualitas Opini yang dikeluarkan oleh auditor BPK-RI terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hal ini berarti bahwa setiap unsur dalam SPI harus menjadi acuan dan menjadi unsur utama dalam berbagai sistem akuntansi yang akan dirancang. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul :

“Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan pada Desa Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pada Desa Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato”?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis : Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan pada Desa Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, penulis berharap dapat bermanfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang pengelolaan keuangan desa, terutama dalam hal pengaruh

sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan pada Desa Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Kantor Desa Maleo.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang akan di ambil.

b. Bagi Penulis

Untuk menerapkan teori yang telah di ambil di bangku kuliah ke dalam praktik yang sesungguhnya khususnya pada obyek yang diteliti.

c. Bagi Pihak Luar

Sebagai bahan masukan dalam rangka membuat karya ilmiah berikutnya.

d. Bagi Ilmu Pengetahuan

Untuk menambah kepustakaan di bidang manajemen keuangan berdasarkan penerapan yang ada dalam dunia nyata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Desa

2.1.1. Pengertian Desa

Menurut Yuliati (2003:24) kata “desa” sendiri berasal dari bahasa India yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Sesuai batasan definisi tersebut, maka di Indonesia dapat ditemui banyak kesatuan masyarakat dengan peristilahannya masing-masing seperti Dusun dan Marga bagi masyarakat Sumatera Selatan, Datu di Maluku, Nagari di Minang, Wanua di Minahasa dan Nagori di Simalungun sendiri. Pada daerah lain masyarakat setingkat desa juga memiliki berbagai istilah dan keunikan sendiri baik mata pencaharian maupun adat istiadatnya.

Menurut W.J.S. Poerwadarminta (2007:286), pengertian desa dimaknai oleh masyarakat sebagai tempat bermukim suatu golongan penduduk yang ditandai dengan penggunaan tata bahasa dengan logat kedaerahan yang kental, tingkat pendidikan relatif rendah, dan umumnya warga masyarakatnya bermata pencaharian di bidang agraris atau kelautan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan desa adalah (1) wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh Kepala Desa), (2) sekelompok rumah diluar kota

yang merupakan kesatuan kampong, dusun, (3) udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman atau lawan dari kota), (4) tempat, tanah, daerah.

2.1.2. Pemerintah Desa

Menurut Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2018 “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf professional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku professional dalam menjalankan tugasnya.

Selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah Pembantu Kepala Desa dan pelaksanaan tugas menyelenggaran Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah pemimpin atau penguasa di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta perangkat desa ataupembantu desa.

Dalam mewakili masyarakat desa untuk hubungan yang sifatnya keluar atau ke dalam masyarakat yang bersangkutan.

2.2. Sistem Pengendalian Internal

Untuk dapat memahami bagaimana sistem pengendalian internal digunakan dalam kegiatan pengamanan kas, dibutuhkan pengetahuan mengenai konsep dasar pengendalian itu sendiri. Oleh karena itu dalam bab ini akan dibahas mengenai sistem pengendalian internal, tujuan sistem pengendalian internal, unsur-unsur pengendalian internal dan komponen pengendalian internal.

Sistem pengendalian internal terdiri dari beberapa kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian kepada manajemen bahwa tujuan dari perusahaan dapat dicapai.

2.2.2 Tujuan Pengendalian Internal

Tujuan dari pengendalian internal menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (2011:319) adalah sebagai berikut :

1. Keandalan laporan keuangan

Umumnya, pengendalian yang relevan dengan suatu audit adalah berkaitan dengan tujuan entitas dalam membuat laporan keuangan bagi pihak luar yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. Efektivitas dan efisiensi operasi

Pengendalian yang berkaitan dengan tujuan operasi dan kepatuhan mungkin relevan dengan suatu audit jika kedua tujuan tersebut berkaitan dengan data yang

dievaluasi dan digunakan auditor dalam prosedur audit. Sebagai contoh, pengendalian yang berkaitan dengan data non keuangan yang digunakan oleh auditor dalam prosedur analitik.

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlakuSuatu entitas umumnya mempunyai pengendalian yang berkaitan dengan tujuan yang tidak relevan dengan suatu audit dan oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan.

Mulyadi (2014:163), mengemukakan bahwa, tujuan sistem pengendalian internal adalah:

1. Menjaga kekayaan organisasi
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
3. Mendorong efisiensi, dan
4. Mendorong dipatuhiinya kebijakan manajemen

2.3. Pengelolaan Keuangan Desa

2.3.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan: Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana dari Pemerintah, dan hasil dari BUMDes. Adapun pelaksanaan urusan pemerintah daerah oleh pemerintah

desa akan didanai dari APBD, sedangkan pelaksanaan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBN.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa: Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Untuk dapat melakukan pengelolaan lebih baik maka tahapan atau siklus Pengelolaan Keuangan Desa bisa dimulai dari perencanaan, kemudian diikuti dengan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Nurcholis (2011: 82) berpendapat bahwa pendapatan desa bersumber dari:

1. Pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa dari retribusi Kabupaten/Kota yang sebagian diperuntukan bagi desa.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%, yang dibagi ke setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Berdasarkan beberapa definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan untuk semua kegiatan yang telah dilakukan.

a. Perencanaan.

Sujarweni Wiratna (2015: 18) menjelaskan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Mekanisme Perencanaan menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
2. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
3. Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain.

5. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
6. Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
7. Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
8. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
9. Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal Pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.

10. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah rencana yang disusun untuk menjamin konsistensi dalam melaksanakan pembangunan agar nantinya sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya, anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan juga pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran tersebut adalah pelaksanaan kewenangan desa yang dilaksanakan melalui rekening desa. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Sehingga semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Herlianto (2017: 12) menjelaskan bahwa: Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan, yaitu:

1. Pemerintah desa bertanggungjawab melaksanakan program kegiatan
2. pemerintah desa yang dibantu oleh Dusun, RT, RW mengumpulkan dana (pendapatan) untuk membiayai pengeluaran.
3. Pemerintah desa mengalokasikan dana untuk membiayai pelaksanaan kegiatan
4. Kepala desa melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap jalannya kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.

5. Masyarakat ikut menyumbangkan tenaga, dana dan ikut berpartisipasi mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah suatu tindakan ataupelaksanaandari sebuah rencana yang telah disusun secara terperinci.

c. Penatausahaan

Herlianto (2017: 13) menjelaskan bahwa penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank desa serta setiap bulan membuat laporan pertanggung jawaban bendahara. Lapananda (2016: 55) menjelaskan bahwa: Penatausahaan keuangan desa ialah kegiatan mengatur keuangan desa dalam rangka mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yaitu asas transparan dan asas akuntabel. Kegiatan penatausahaan meliputi semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas yang disertai oleh dokumen pendukung seperti buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank desa. Penatausahaan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 35 dan 36 yaitu:

- 1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa
- 2) Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- 3) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

- 4) Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- 5) Penatausahaan penerimaan dan menggunakan:
 - Buku kas umum
 - Buku Kas Pembantu Pajak dan
 - Buku Bank.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran.

d. Pelaporan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:

1. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi ABDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan danb. Laporan semester akhir tahun, yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.
2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.
3. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota.

4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaporan adalah penyampaian pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

e. Pertanggungjawaban

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 pertanggungjawaban terdiri dari:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepadabupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:
 - a) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan
 - b) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan dan
 - c) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBdesa, disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban untuk

APBDesa dilaksanakan melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan dilaporkan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenan

f. Pengawasan

Menurut Herlianto (2017: 17) mengemukakan bahwa: Pengawasan dan evaluasi sangat penting untuk menilai apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana, apakah danadigunakan sebagaimana mestinya, apakah kegiatan mencapai hasil sesuai dengan rencana, serta merumuskan agenda bersama untuk perbaikan pada tahun berikutnya. Sujarweni (2015: 23) lebih lanjut menjelaskan bahwa:

1. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa meliputi pembinaan dan pengawasan dalam penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota.

2.3.2. Asas Pengelolaan Keuangan Desa.

1. Transparan

Menurut Mahmudi (2011: 17-18) Transparansi memiliki arti Transparan merupakan keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya public kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen

organisasi sektor publik tentang aktivitas, program, dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakan. Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip *Good Governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk.

- a. Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi v.s anggaran).
- b. Menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.
- c. Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait.
- d. Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas transparan dapat diartikan sebagai suatu keterbukaan yang dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses guna mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.

2. Akuntabel

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Menurut Sujarweni (2015:28) menyatakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang

diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan yang tertulis yang informatif dan transparan. Mardiasmo (2010 : 20) mengatakan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, organisasi sektor public berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik. Hak-hak publik itu antara lain:

- a. hak untuk tahu (*right to know*),
- b. hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan
- c. hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*).

Organisasi sektor publik dituntut untuk tidak sekedar melakukan akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), yaitu pelaporan kepada atasan, akan tetapi juga melakukan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) yaitu pelaporan kepada masyarakat. Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas maka ditarik kesimpulannya bahwa, akuntabel adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian dalam pelaksanaan untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

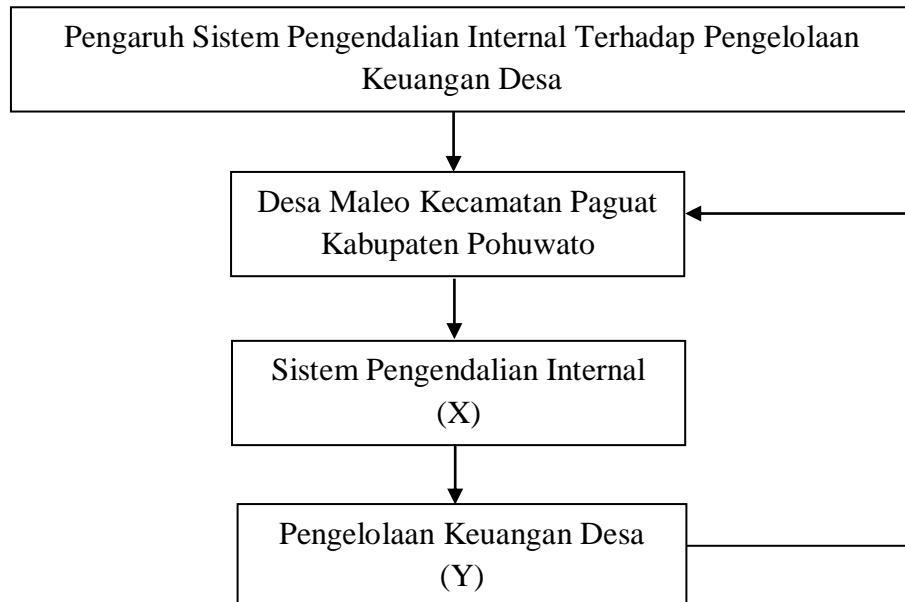
3. Partisipatif

Menurut Sujarweni (2015:29) yang dimaksud dengan partisipatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk

terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung. Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas maka ditarik kesimpulan bahwa, partisipatif adalah keikutsertaan orang yang bersangkutan yang mempunyai hak dalam pengambilan bagian setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa serta masyarakat untuk mendapatkan keputusan.

2.4. Kerangka Pikir

Sugiyono (2008:60) mengemukakan bahwa kerangka pikir menggambarkan pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan desa pada desa Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato. Berdasarkan kajian teori di atas maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut :



Gambar 2.1. : Kerangka Pikir

2.5. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, dan kerangka pikir maka hipotesis penelitian ini adalah “Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan pada Desa Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato”.

BAB III

OBYEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Obyek Penelitian

Adapun yang menjadi obyek penelitian pada karya ilmiah ini adalah pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan pada Desa Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato.

3.2. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:2) pengertian metodologi penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dikembangkan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada giliranya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif yaitu dengan menggunakan statistika untuk mendeskripsikan atau menggabarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2014:147).

3.2.1. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random atau acak, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji

hipotesis yang telah ditetapkan. Adapun metode penelitian yang digunakan sesuai dengan tujuan dan permasalahan dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif.

Menurut Sugiono (2009:11) Metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya.

3.2.2. Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, variabel penelitian terbagi dua yaitu variabel dependen (Y) dan variabel independen (X).

1. Variabel terikat atau dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2014:97). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa (Y).
2. Variabel bebas atau independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2014:96).

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian internal (X).

Tabel 3.1
Tabel Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	1. Transparan 2. Akuntabel	1. Akses Dokumen Pengelolaan Mudah Diperoleh 2. Pengumuman Pengelolaan Transparan 3. Rencana strategi kebijakan 4. Indikator evaluasi Pengelolaan

(PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018)	3. Partisipasi	5. Keterlibatan Pengelolaan 6. Keterlibatan Pengawasan	Masyarakat Dalam Masyarakat Dalam
Sistem Pengendalian Internal (X) (PP No. 60 Tahun 2008)	1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Resiko 3. Pengendalian 4. Informasi & Komunikasi 5. Pemantauan	1. Penilaian Kualitas 2. Standar Kompetensi 3. Identifikasi Resiko. 4. Penanganan Resiko 5. Kebijakan Panganan Fisik 6. Pengembangan Rencana 7. Informasi Tepat Waktu 8. Pertanggungjawaban Tepat Waktu 9. Tindak Lanjut Hasil Penilaian 10. Reviu Temuan	

3.2.3. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, BPD, Aparat Desa dan Kepala Dusun serta Tokoh Masyarakat pada Desa Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato yang berjumlah 30 orang responden. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *sampling* jenuh (sensus). Menurut Sugiyono (2004:44) *sampling* jenuh adalah teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel karena jumlah populasi kecil dan relatif heterogen.

3.2.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiono (2014:61) merupakan langkah strategis dalam penelitian karena tujuan utamanya adalah memperoleh data. Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian ini, maka teknik yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

a. *Library Research*

Library research bertujuan untuk mengumpulkan referensi-referensi baik itu dalam bentuk buku, majalah, jurnal maupun buletin-buletin yang terkait dengan obyek yang diteliti.

b. *Field Research*

Field research bertujuan untuk mengumpulkan data-data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan cara :

1. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan variabel yang diteliti.
2. Kuisisioner, yaitu menyebarkan daftar pertanyaan yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan variabel yang diteliti.

Dalam penelitian ini, untuk mengukur pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan desa menggunakan skala *likert*. Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2014:92). Dengan skala *likert*, maka variabel yang akan diukur dalam penelitian ini dijabarkan menjadi sub variabel, yang kemudian dijabarkan lagi menjadi indikator-indikator yang dapat diukur. Indikator-indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang berupaya pernyataan-pernyataan yang harus dijawab oleh responden.

Tabel 3.2.
Skala Likert

Keterangan	Bobot
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Kurang Setuju	3
Tidak setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : Sugiyono (2014:92)

3.2.5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Regresi Sederhana

Untuk melihat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan pada Desa Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, maka peneliti menggunakan analisis regresi linier sederhana. Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk melihat bentuk hubungan antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Menurut Sugiono (2014) persamaan regresi sederhana adalah sebagai berikut :

$$Y = a + bX + \epsilon$$

Dimana:

Y = Variabel dependent (Pengelolaan Keuangan Desa)

a = Koefisien regresi (konstanta)

b = Koefisien regresi Sistem Pengendalian Internal

X = Variabel independent Sistim Pengendalian Internal

ϵ = Pengaruh Variabel Lain

2. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai Koefisien Determinasi (R^2) adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel sangat terbatas.

Menurut Ghazali (2016:97) nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3. Uji Hipotesis

Uji signifikansi digunakan untuk menguji kewajaran atau kelayakan hasil penelitian dengan menggunakan uji t dan uji F, Widayat (2002 : 104). Untuk itu uji hipotesis penelitian korelasi parsial digunakan uji t dan korelasi secara simultan uji F. Analisis data kuantitatif menggunakan program SPSS, dalam penelitian ini menggunakan nilai signifikansi dengan taraf $\alpha = 5\%$.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Asal-usul Desa Maleo terbentuk dari pemekaran dari Kelurahan Libuo Hal ini diprakarsai atas perjuangan para tokoh masyarakat yakni dari golongan tokoh pemuda. Seiring perkembangan Zaman, dan kebutuhan masyarakat, Desa ini dibagi menjadi berbagai dusun. Sehingga pada tahun 2003 Desa Maleo terpisah dari pemekaran dari Kelurahan Libuo dengan nama Desa Maleo.

Desa ini dikenal dengan desa yang subur dan tumbuhan yang menghijau diatas tanahnya yang terkenal di Provinsi Gorontalo. Sekolompok masyarakat yang rukun dan damai, meskipun masih dalam kondisi kehidupan yang sangat ekonomis, bisa menciptakan keharmonisan dalam bermasyarakat.

Desa Maleo pada awalnya termasuk dalam wilayah Kecamatan Paguat disebelah utara berbatasan dengan Hulawa, sebelah selatan berbatasan dengan teluk tomini, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Libuo dan sebelah barat berbatasan dengan Palopo / Teratai. Desa ini pada tahun 2008 masuk ke dalam wilayah kecamatan Paguat dengan adanya pemekaran kecamatan yang terbagi menjadi Dua Kecamatan yaitu Kecamatan Paguat, dan kecamatan Dengilo.

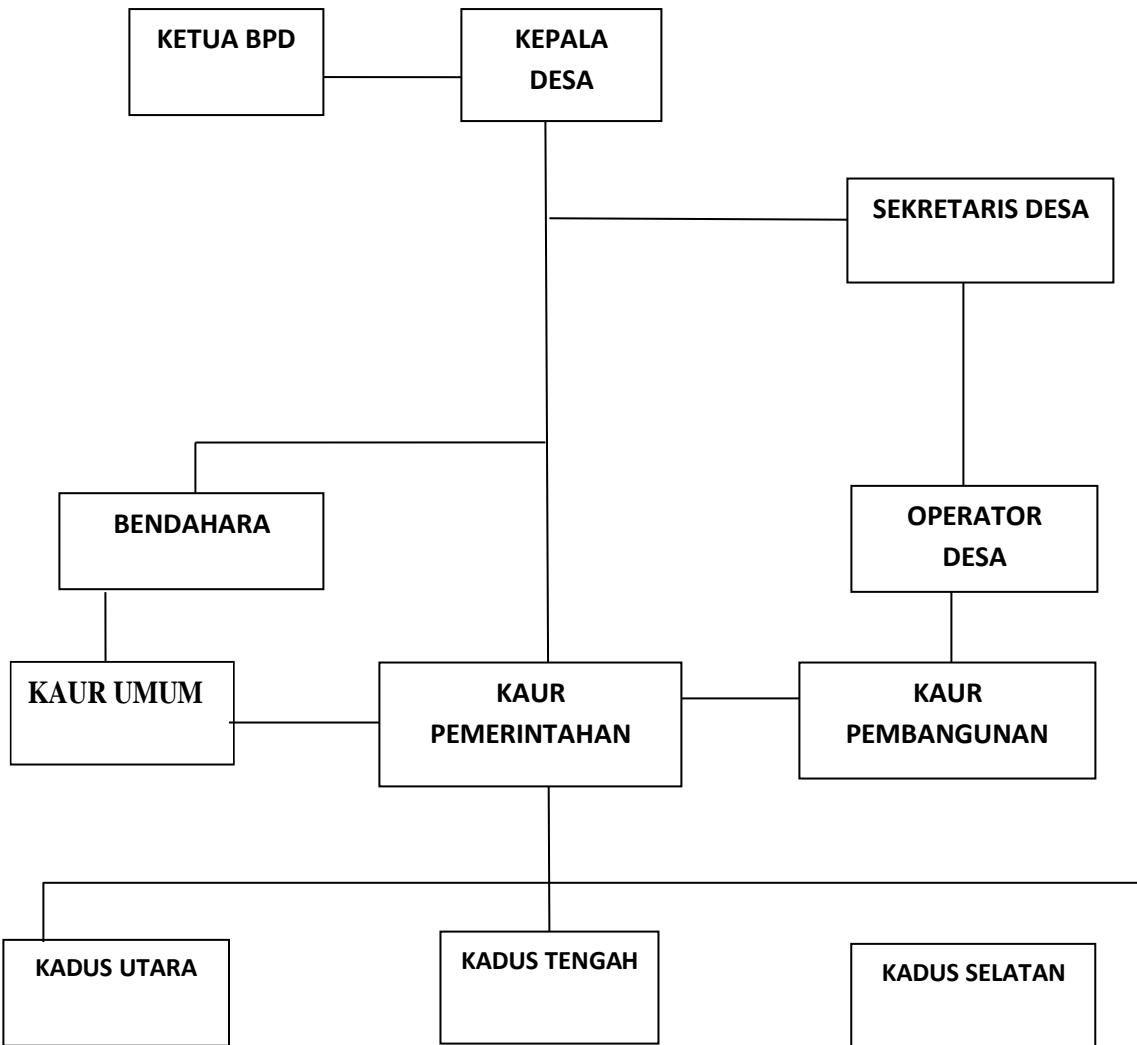
Jumlah penduduk sampai pada tahun 2009 (data pertama pasca pemekaran kecamatan) mencapai 1.027 jiwa dengan Jumlah kepala Keluarga sebanyak 339 KK

Sehingga pada tahun 2010 Jumlahnya berkurang menjadi 352 KK dengan luas wilayah 30.16 Km² Mata pencaharian masyarakat adalah petani, berkebun, dimana untuk pertanian di Desa Maleo didominasi oleh pertanian Jagung dengan luas tanaman jagung mencapai 13 Ha, kelompok tani berjumlah 11 kelompok, dengan adanya pertanian tersebut dapat menghidupi kehidupan masyarakat di Desa Maleo.

Sampai saat ini keharmonisan antar warga dan sistem pemerintahan berjalan dengan baik. Desa Maleo pada tahun 2008 telah mengadakan pemilihan kepala Desa secara langsung dan yang terpilih sebagai kepala desa adalah Bapak Ram Botutihe untuk Periode 2008-2014.

Bapak Ram Botutihe adalah orang Kedua yang menduduki jabatan pemerintahan di Desa Maleo. Mayoritas mata pencaharian penduduk sangat berpengaruh dengan lajunya perkembangan ekonomi desa ini, yang disebabkan oleh adanya kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa dengan mengadakan sosialisasi pembibitan, pengukuhan, dan pengelolaan di bidang pertanian sehingga bisa mengasah keahlian para petani dan perkebunan di Desa Maleo. Nama Desa Maleo juga merupakan ciri khas satwa yang ada di wilayah Provinsi Gorontalo dalam bahasa yaitu burung maleo yang sampai saat masih didapati di sekitar daerah Pohuwato.

Struktur Kelembagaan Desa Maleo
Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato



Struktur Organisasi Di Atas Dapat Menjelaskan tentang tugas-tugas dan fungsi bagi setiap perangkat desa. Kepala desa dalam menjalankan semua kebijakan dan programnya, tidak terlepas dari pengawasan yang dilakukan oleh badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai lembaga yang mengawasi semua kebijakan dan keputusan kepala desa, termasuk dapat memberikan teguran apabila kebijakan-

kebijaan tida berpihak pada kepentingan masyarakat. Selanjutnya, untuk sekretaris desa yang dibantu operator desa bertanggung jawab sepenuhnya membantu kepala desa dalam hal administrasi yang ada di desa, selanjutnya sekretaris desa dapat mewakili kepala desa apabila kepala desa berhalanagn dalam menghadiri hajatan atau lain sebagainya yang dilaksanakan oleh anggota masyarakat.

4.2. Hasil Penelitian dan Analisis Deskriptif

Pada penelitian ini penulis membahas variabel X yang mempengaruhi variabel Y, dalam hal ini adalah variabel sistem pengendalian internal (X), sedangkan variabel terikat yaitu pengelolaan keuangan desa (Y). Skala penilaian untuk masing-masing item pertanyaan terlebih dahulu menghitung rentang skalanya. Adapun hasilnya adalah :

Skor terendah = Bobot terendah x Jumlah responden = $1 \times 1 \times 30 = 30$

Skor tertinggi = Bobot tertinggi x Jumlah responden = $5 \times 1 \times 30 = 150$

Dari hasil perhitungan rentang bobot terendah sampai bobot tertinggi adalah :

$$\text{Rentang Skala} = \frac{150 - 30}{5} = 24$$

Tabel 4.1.

Rentang Skala Pengukuran Jawaban Responden

Range	Kategori
130 – 154	Sangat Baik
105 – 129	Baik

80 – 104	Kurang Baik
55 – 79	Tidak Baik
30 – 54	Sangat Tidak Baik

Sumber : Olahan Data 2022

4.2.1. Analisis Deskriptif Variabel Sistem Pengendalian Intern (X)

Tanggapan responden untuk setiap pernyataan dalam variabel ini yang berjumlah 10 item pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2. Tanggapan Responden
Pada Variabel Sistem Pengendalian Intern**

Bobot	Item 1			Item 2			Item 3			Item 4			Item 5		
	F	S	%	F	S	%	F	S	%	F	S	%	F	S	%
5	16	80	80	12	60	60	12	60	60	7	35	35	14	70	70
4	4	16	20	8	32	40	6	24	30	8	32	40	6	24	30
3	0	0	0	0	0	0	2	6	10	5	15	25	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	20	96	100	20	92	100	20	90	100	20	82	100	20	94	100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2021

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan Kepala Desa selalu melakukan pemeriksaan terhadap catatan akuntansi, fisik kas, barang, dan secara terus menerus melakukan penilaian terhadap kualitas pengendalian intern diperoleh tanggapan responden sebanyak 16 responden atau 80% yang menjawab sangat setuju dengan skor 80, sebanyak 4 responden atau 20% yang menjawab setuju dengan skor 16, sehingga total skor item 1 adalah 96.

Untuk pernyataan tentang Kantor Desa telah memiliki standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi diperoleh tanggapan responden sebanyak 12 responden atau 60% yang menjawab sangat setuju dengan skor 60, sebanyak 8 responden atau 40% yang menjawab setuju dengan skor 32, sehingga total skor item 2 adalah 92.

Untuk pernyataan tentang pimpinan telah melakukan analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap sistem akuntansi diperoleh tanggapan responden sebanyak 12 responden atau 60% yang menjawab sangat setuju dengan skor 60, sebanyak 6 responden atau 30% yang menjawab setuju dengan skor 24, sehingga total skor item 3 adalah 90.

Untuk pernyataan tentang pimpinan selalu memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi risiko pelanggaran terhadap sistem dan prosedur akuntansi diperoleh tanggapan responden sebanyak 7 responden atau 35% yang menjawab sangat setuju dengan skor 35, sebanyak 8 responden atau 40% yang menjawab setuju dengan skor 32 dan 5 responden atau 25% yang menjawab kurang setuju dengan skor 15, sehingga total skor item 4 adalah 82.

Untuk pernyataan tentang kebijakan maupun prosedur pengamanan fisik atas asset telah ditetapkan dengan baik dan pengeluaran uang pada kantor desa selalu didokumentasikan pada bukti pengeluaran kas diperoleh tanggapan responden sebanyak 14 responden atau 70% yang menjawab sangat setuju dengan skor 70, sebanyak 6 responden atau 30% yang menjawab setuju dengan skor 24, sehingga total skor item 5 adalah 94.

**Tabel 4.3. Tanggapan Responden
Pada Variabel Sistem Pengendalian Intern**

Bobot	Item 6			Item 7			Item 8			Item 9			Item 10		
	F	S	%	F	S	%	F	S	%	F	S	%	F	S	%
5	14	70	70	9	45	45	8	40	40	14	70	70	11	55	55
4	6	24	30	7	28	35	8	32	40	6	24	30	9	36	45
3	0	0	0	4	12	20	4	12	20	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	20	94	100	20	85	100	20	84	100	20	94	100	20	91	100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2021

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang instansi pemerintah telah mengembangkan rencana untuk identifikasi maupun pengamanan atas asset infrastuktur dan semua transaksi yang diproses kedalam komputer adalah transaksi yang telah diotorisasi diperoleh tanggapan responden sebanyak 14 responden atau 70% yang menjawab sangat setuju dengan skor 70, sebanyak 6 responden atau 30% yang menjawab setuju dengan skor 24, sehingga total skor item 6 adalah 94.

Untuk pernyataan tentang informasi telah disediakan secara tepat waktu dan saluran komunikasi telah dilaksanakan secara efektif diperoleh tanggapan responden sebanyak 9 responden atau 45% yang menjawab sangat setuju dengan skor 45, sebanyak 7 responden atau 35% yang menjawab setuju dengan skor 28 dan 4 responden atau 20% yang menjawab kurang setuju dengan skor 12, sehingga total skor item 7 adalah 85.

Untuk pernyataan tentang pengguna anggaran/pemegang kas pada masing-masing kantor desa telah menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat pada waktunya diperoleh tanggapan responden sebanyak 8 responden atau 40% yang

menjawab sangat setuju dengan skor 40, sebanyak 8 responden atau 40% yang menjawab setuju dengan skor 32 dan 4 responden atau 20% yang menjawab kurang setuju dengan skor 12, sehingga total skor item 8 adalah 84.

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang kantor desa selalu menindaklanjuti setiap hasil temuan/reviu maupun saran yang diberikan oleh BPK/Inspektorat, dan sebagai tindak lanjut dari penilaian terhadap kualitas pengendalian intern, BPPKPD melakukan perbaikan pengendalian intern diperoleh tanggapan responden sebanyak 14 responden atau 70% yang menjawab sangat setuju dengan skor 70, sebanyak 6 responden atau 30% yang menjawab setuju dengan skor 24, sehingga total skor item 9 adalah 94.

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang pimpinan selalu mereviu dan mengevaluasi temuan yang menunjukkan adanya kelemahan dan perlu perbaikan diperoleh tanggapan responden sebanyak 11 responden atau 55% yang menjawab sangat setuju dengan skor 50, sebanyak 9 responden atau 45% yang menjawab setuju dengan skor 36, sehingga total skor item 10 adalah 91.

Tabel 4.4.
Rekapan tanggapan Responden
Variabel kompetensi

		Statistics										
		Sistem Pengendalian Internal	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10
N	Valid	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sum	904	96	92	90	82	96	94	85	84	94	91

Sumber : Olahan Data Deskriptif SPSS-16 tahun 2022

Berdasarkan analisis deskriptif data pada variabel sistem pengendalian intern (X) dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden memiliki tanggapan yang sangat baik terhadap pernyataan-pernyataan yang ada pada variabel sistem pengendalian intern (X) terhadap pengelolaan keuangan desa (Y) yaitu rata-rata sebesar 90.

4.2.2. Analisis Deskriptif Variabel Pengelolaan Keuangan (Y)

Tanggapan responden untuk setiap pernyataan dalam variabel ini yang berjumlah 12 item pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Pendapat responden untuk setiap pernyataan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5. Tanggapan Responden
Pada Variabel Pengelolaan Keuangan Desa

Bobot	Item 1			Item 2			Item 3			Item 4		
	F	S	%	F	S	%	F	S	%	F	S	%
5	9	45	45	16	80	80	15	75	75	11	55	55
4	6	24	30	3	12	15	5	20	25	7	28	35
3	5	15	25	1	3	5	0	0	0	2	6	10

2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	20	84	100	20	95	100	20	95	100	20	89	100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2022

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang akses untuk memperoleh dokumen tentang pengelolaan keuangan mudah diperoleh diperoleh tanggapan responden sebanyak 9 responden atau 45% yang menjawab sangat setuju dengan skor 45, sebanyak 6 responden atau 30% yang menjawab setuju dengan skor 24 dan 5 responden atau 25% yang menjawab kurang setuju dengan skor 15, sehingga total skor item 1 adalah 80.

Untuk pernyataan tentang pengumuman pengelolaan keuangan dapat meningkatkan transparansi diperoleh tanggapan responden sebanyak 16 responden atau 80% yang menjawab sangat setuju dengan skor 80, sebanyak 3 responden atau 15% yang menjawab setuju dengan skor 12 dan 1 responden atau 5% yang menjawab kurang setuju dengan skor 3, sehingga total skor item 2 adalah 95.

Untuk pernyataan tentang transparansi yang positif dapat menunjang kinerja pengelolaan keuangan diperoleh tanggapan responden sebanyak 15 responden atau 75% yang menjawab sangat setuju dengan skor 75, sebanyak 5 responden atau 25% yang menjawab setuju dengan skor 20, sehingga total skor item 3 adalah 90.

Untuk pernyataan tentang penyediaan informasi yang bertanggung jawab diperoleh tanggapan responden sebanyak 11 responden atau 55% yang menjawab sangat setuju dengan skor 55, sebanyak 7 responden atau 35% yang menjawab setuju

dengan skor 28 dan 2 responden atau 10% yang menjawab kurang setuju dengan skor 6, sehingga total skor item 4 adalah 89.

**Tabel 4.5. Tanggapan Responden
Pada Variabel Pengelolaan Keuangan Desa**

Bobot	Item 5			Item 6			Item 7			Item 8		
	F	S	%	F	S	%	F	S	%	F	S	%
5	9	45	45	12	60	60	9	45	45	9	45	45
4	7	28	35	5	20	25	7	28	35	7	28	35
3	3	9	15	2	6	10	3	9	15	3	9	15
2	1	2	5	1	2	5	1	2	5	1	2	5
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	20	84	100	20	88	100	20	84	100	20	84	100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2021

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang rencana strategi dan arah kebijakan umum merupakan dasar dalam pengelolaan keuangan diperoleh diperoleh tanggapan responden sebanyak 9 responden atau 45% yang menjawab sangat setuju dengan skor 45, sebanyak 7 responden atau 35% yang menjawab setuju dengan skor 28, sehingga total skor item 5 adalah 84.

Untuk pernyataan tentang indikator hasil kerja yang akan dicapai, ditetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan diperoleh tanggapan responden sebanyak 12 responden atau 60% yang menjawab sangat setuju dengan skor 60, sebanyak 5 responden atau 25% yang menjawab setuju dengan skor 20 dan 2 responden atau 10% yang menjawab kurang setuju dengan skor 6 serta 1 responden atau 5% menjawab tidak setuju dengan skor 2, sehingga total skor item 6 adalah 88.

Untuk pernyataan tentang kinerja pengelolaan keuangan di tiap-tiap unit melibatkan semua unsur-unsur dalam unit tersebut diperoleh tanggapan responden sebanyak 9 responden atau 45% yang menjawab sangat setuju dengan skor 45, sebanyak 7 responden atau 35% yang menjawab setuju dengan skor 28 dan 3 responden atau 15% yang menjawab kurang setuju dengan skor 9 dan 1 responden atau 5% yang menjawab kurang setuju dengan skor 2, sehingga total skor item 7 adalah 84.

Untuk pernyataan tentang kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan keuangan diperoleh tanggapan responden sebanyak 9 responden atau 45% yang menjawab sangat setuju dengan skor 45, sebanyak 7 responden atau 35% yang menjawab setuju dengan skor 28 dan 3 responden atau 15% yang menjawab kurang setuju dengan skor 9 dan 1 responden atau 5% yang menjawab sangat tidak setuju dengan skor 2, sehingga total skor item 8 adalah 84.

**Tabel 4.6. Tanggapan Responden
Pada Variabel Pengelolaan Keuangan Desa**

Bobot	Item 9			Item 10			Item 11			Item 12		
	F	S	%	F	S	%	F	S	%	F	S	%
5	16	80	80	18	90	90	10	50	50	9	45	45
4	2	8	10	2	8	10	8	32	40	11	44	55
3	2	6	10	0	0	0	2	6	10	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	20	94	100	20	98	100	20	88	100	20	89	100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2021

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang masyarakat desa terlibat dalam pengambilan keputusan program-program desa diperoleh diperoleh tanggapan responden sebanyak 16 responden atau 80% yang menjawab sangat setuju dengan skor 80, sebanyak 2 responden atau 10% yang menjawab setuju dengan skor 8 dan 2 responden atau 10% yang menjawab kurang setuju dengan skor 6, sehingga total skor item 9 adalah 94.

Untuk pernyataan tentang masyarakat desa memberikan masukan kepada BPD dan Pemerintah Desa diperoleh tanggapan responden sebanyak 18 responden atau 90% yang menjawab sangat setuju dengan skor 90, sebanyak 2 responden atau 10% yang menjawab setuju dengan skor 8, sehingga total skor item 10 adalah 98.

Untuk pernyataan tentang transparansi yang positif dapat menunjang kinerja pengelolaan keuangan diperoleh tanggapan responden sebanyak 10 responden atau 50% yang menjawab sangat setuju dengan skor 50, sebanyak 8 responden atau 40% yang menjawab setuju dengan skor 32 dan 2 responden atau 10% yang menjawab kurang setuju dengan skor 6, sehingga total skor item 11 adalah 88.

Untuk pernyataan tentang masyarakat desa melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran desa diperoleh tanggapan responden sebanyak 9 responden atau 45% yang menjawab sangat setuju dengan skor 45, sebanyak 11 responden atau 55% yang menjawab setuju dengan skor 44, sehingga total skor item 12 adalah 89.

**Tabel 4.7. Rekapan Tanggapan Responden
Pada variabel pengelolaan Keuangan Desa**

Statistics

	Pengelolaan Keuangan Desa	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12
N Valid	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum	1069	84	95	95	89	84	87	84	84	92	98	88	89

Sumber : Olahan Data Deskriptif SPSS-16 tahun 2021

Berdasarkan tabulasi data pada variabel pengelolaan keuangan desa (Y) dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden memiliki tanggapan yang sangat baik terhadap pernyataan-pernyataan yang ada pada variabel pengelolaan keuangan desa (Y) yaitu rata-rata sebesar 89.

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Regresi Sederhana

Penelitian ini menggunakan uji analisis regresi linear sederhana untuk memprediksi apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan di Desa Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato. Analisis ini menggunakan data berdasarkan kuesioner yang dibagikan. Perhitungan uji ini dilakukan dengan bantuan SPSS-16. Adapun hasil dari uji analisis regresi linear sederhana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	21.151	12.906		1.639	.112
Sistem Pengendalian Intern	.718	.286	.429	2.510	.018

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan

Sumber : Olahan Data SPSS-16 tahun 2022

Dari tabel 4.10 di atas menunjukkan hasil yang diperoleh nilai constant (a) sebesar 21,151 sedangkan nilai fungsi manajemen (koefisien regresi) sebesar 0,718.

Dari hasil tersebut dapat dimasukkan dalam persamaan regresinya adalah: $Y = 21,151 + 0,718X + \epsilon$

Dari hasil olahan data SPSS maka diperoleh persamaan regresi sederhana dimana nilai constant 21,151 yang artinya jika sistem pengendalian intern diabaikan maka capaian pengelolaan keuangan sebesar 21,151.

Koefisien regresi sistem pengendalian intern (X) sebesar 0,718 hal ini berarti bahwa perubahan variabel sistem pengendalian intern (X) akan diikuti oleh perubahan pengelolaan keuangan di Desa Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato (Y) sebesar 0,718. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh sistem pengendalian intern (X) terhadap

pengelolaan keuangan di Desa Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato (Y) adalah positif. Nilai t_{hitung} diperoleh sebesar 2,510 lebih besar jika dibandingkan dengan nilai t_{tabel} sebesar 2,048. Yang berarti bahwa variabel sistem pengendalian intern (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan di Desa Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato (Y). Demikian pula halnya diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,018 yang lebih kecil dari taraf signifikan yang digunakan yaitu 0,05 atau 5% ($0,018 < 0,05$).

2. Koefisien Determinasi (R^2)

Dalam menentukan besarnya pengaruh variabel sistem pengendalian intern (X) terhadap variabel pengelolaan keuangan desa pada Desa Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, maka peneliti gunakan uji koefisien determinasi (R^2) berikut ini.

Tabel 4.10

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.429 ^a	.184	.154	3.676

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Intern

Sumber : Olahan Data SPSS-16 tahun 2022

Olahan data pada program SPSS diperoleh nilai R Square (r^2) sebesar 0,184 atau 18,4%. Yang berarti bahwa besarnya sistem pengendalian internal yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa adalah sebesar 0,184. Selain itu koefisien determinasi menjelaskan bahwa jika sistem pengendalian internal yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka pengelolaan keuangan desa pada desa Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato sebesar 18,4%, sedangkan sisanya sebesar 81,6% dijelaskan oleh variabel lain di luar dari model.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan, bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan pada Desa Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato.

5.2. Saran-Saran

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka selanjutnya penulis akan menyajikan saran-saran sebagai masukan bagi :

1. Pemerintah desa diharapkan dapat mempertahankan sistem pengendalian internalnya dalam mengelola keuangan desa di Desa Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato.
2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar meneliti variabel lain yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan yang ada di Desa Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Adisty C. (2012). *Asuhan Gizi Nutritional Care Process*. Yogyakarta
- Chung,N.T., et all. 2015. *Impact of Seasonal Climate Variability on Rice Production in the Central Highlands of Vietnam*. *Agriculture and Agricultural Science Procedia*.
- Ghozali. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program I B M S P S S*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanif Nurcholis, 2011. Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jakarta : penerbit ERLANGGA
- Herlianto, D. (2017). *Manajemen Keuangan Desa*. Yogyakarta : Gosyen Publishing
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Kumaat, Valarey G. (2011). *Internal Audit*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Lapananda, 2016. *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*, Buku I. Penerbit Rmbooks. Jakarta.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. 2010. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi Offset
- Mulyadi. 2014. *Sistem Akuntansi*. Cetakan Keempat. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- _____. 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta.
- _____. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- _____. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta, Bandung.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa.

_____, No.60 Tahun 2008 Tentang System Pengendalian Internal.

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

_____, Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Widjaja. 2003. Otonomi Daerah. Jakarta : PT raja Grafindo Persada.

Yayuk Yulianti. 2003. Sosiologi Pedesaan. Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama.

W.J.S.Poerwadarminta 2007.Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Lampiran 1

JADWAL PENELITIAN

Lampiran 2

KUISIONER

Dalam rangka penyusunan skripsi mengenai “Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap pengelolaan keuangan pada Desa Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato” Maka penulis memohon bantuan Bapak/ Ibu / Saudara/ I untuk meluangkan sedikit waktu mengisi daftar pertanyaan di bawah ini. Mengenai identitas Bapak/ Ibu/ Saudara/ I kami jamin kerahasiaannya.

Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas bantuan yang Bapak/ Ibu/ Saudara/I berikan.

Hormat Saya,

Sasmita S. Geli
NIM E21.19.208

PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER

Pilihlah pernyataan berikut sesuai dengan pendapat anda, dengan cara memberikan tanda (✓) pada kolom yang tersedia. Adapun makna tanda tersebut adalah :

5	Sangat Setuju	(SS)
4	Setuju	(S)
3	Kurang Setuju	(KS)
2	Tidak Setuju	(TS)
1	Sangat Tidak Setuju	(STS)

A. PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Y)

No	Pernyataan Indikator Transparan	SS	S	KS	TS	STS
1	Akses untuk memperoleh dokumen tentang pengelolaan keuangan mudah diperoleh					
2	Pengumuman pengelolaan keuangan dapat meningkatkan transparansi					
3	Transparansi yang positif dapat menunjang kinerja pengelolaan keuangan					
4	Penyediaan informasi yang bertanggung jawab					

No	Pernyataan Indikator Akuntabel	SS	S	KS	TS	STS
1	Rencana strategi dan arah kebijakan umum merupakan dasar dalam pengelolaan keuangan					
2	Indikator hasil kerja yang akan dicapai, ditetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan					

3	Kinerja pengelolaan keuangan di tiap-tiap unit melibatkan semua unsur-unsur dalam unit tersebut					
4	Kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan keuangan					

No	Pernyataan Indikator Partisipasi	SS	S	KS	TS	STS
1	Masyarakat desa terlibat dalam pengambilan keputusan program-program desa					
2	Masyarakat desa memberikan masukan kepada BPD dan Pemerintah Desa					
3	Masyarakat desa melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran desa					
4	Masyarakat desa memberikan penilaian pelaksanaan anggaran desa					

B. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (X)

No	Pernyataan Indikator Lingkungan Pengendalian	SS	S	KS	TS	STS
1	Kepala Desa selalu melakukan pemeriksaan terhadap catatan akuntansi, fisik kas, barang, dan secara terus menerus melakukan penilaian terhadap kualitas pengendalian intern					
2	Kantor Desa telah memiliki standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi					

No	Pernyataan Indikator Penilaian Resiko	SS	S	KS	TS	STS

1	Pimpinan telah melakukan analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap sistem keuangan.					
2	Pimpinan selalu memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi risiko pelanggaran terhadap sistem dan prosedur keuangan.					

No	Pernyataan Indikator Pengendalian	SS	S	KS	TS	STS
1	Kebijakan maupun prosedur pengamanan fisik atas asset telah ditetapkan dengan baik dan pengeluaran uang pada kantor Desa selalu didokumentasikan pada bukti pengeluaran kas					
2	Instansi Pemerintah telah mengembangkan rencana untuk identifikasi maupun pengamanan atas asset infrastruktur dan semua transaksi yang diproses kedalam komputer adalah transaksi yang telah diotorisasi					
No	Pernyataan Indikator Informasi Komunikasi	SS	S	KS	TS	STS
1	Informasi telah disediakan secara tepat waktu dan saluran komunikasi telah dilaksanakan secara efektif					
2	Pengguna anggaran/pemegang kas pada masing-masing kantor Desa telah menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat pada waktunya					

No	Pernyataan Indikator Pemantauan dan Pengendalian Intern	SS	S	KS	TS	STS
1	Kantor desa selalu menindaklanjuti setiap hasil temuan/reviu maupun saran yang diberikan oleh BPK/Inspektorat, dan sebagai tindak lanjut dari penilaian terhadap kualitas pengendalian intern, BPPKPD melakukan perbaikan pengendalian intern					

2	Pimpinan selalu mereviu dan mengevaluasi temuan yang menunjukkan adanya kelemahan dan perlu perbaikan					
---	---	--	--	--	--	--

Lampiran 3

TABULASI DATA

N	Variabel Sistem Pengendalian Intern (X)										Jml
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	4	5	5	5	4	4	5	4	4	4	44
2	5	4	5	4	5	5	5	3	5	5	46
3	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	48
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	42
6	5	4	5	4	5	4	4	5	4	5	45
7	5	5	4	3	5	5	3	3	5	4	42
8	5	4	5	4	4	5	4	3	5	5	44
9	5	5	3	4	5	5	4	4	4	4	43
10	5	4	4	3	5	5	3	4	5	5	43
11	5	5	5	5	4	5	4	3	5	5	46
12	5	4	5	5	4	4	5	4	4	5	45
13	4	5	4	3	5	5	5	5	5	4	45
14	4	4	3	4	5	4	5	5	5	5	44
15	5	5	4	4	5	5	3	4	4	4	43
16	5	5	4	5	5	5	4	5	5	4	47
17	5	4	5	5	5	4	3	4	5	5	45
18	5	5	5	3	5	5	4	4	5	4	45
19	5	5	5	3	5	5	5	5	5	4	47
20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
21	4	5	5	5	4	4	5	4	4	4	44
22	5	4	5	4	5	5	5	3	5	5	46
23	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	48
24	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
25	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	42
26	5	4	5	4	5	4	4	5	4	5	45
27	5	5	4	3	5	5	3	3	5	4	42
28	5	4	5	4	4	5	4	3	5	5	44
29	5	5	3	4	5	5	4	4	4	4	43
30	5	4	4	3	5	5	3	4	5	5	43

C	Pengelolaan Keuangan Desa (Y)												Jml
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	5	5	5	4	5	5	3	5	5	4	4	4	54
2	4	5	5	4	5	3	4	4	5	5	5	5	54
3	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	59
4	5	5	4	5	5	5	4	3	5	5	5	5	56
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	59
6	4	5	5	5	4	4	5	2	5	5	4	4	52
7	3	4	5	4	2	5	5	4	5	5	5	5	52
8	4	5	5	3	5	4	3	3	5	5	4	4	50
9	3	5	5	3	4	4	4	5	5	5	4	4	51
10	3	5	4	4	3	3	4	5	5	5	4	4	49
11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
12	4	5	4	4	4	4	4	3	5	5	4	4	50
13	3	4	5	5	4	5	3	4	2	5	3	4	47
14	3	5	5	5	3	5	2	4	2	5	3	4	46
15	4	3	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	52
16	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
17	5	5	4	5	4	5	4	4	5	5	5	5	56
18	4	5	4	4	3	1	5	4	5	5	5	4	49
19	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	57
20	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	56
21	5	5	5	4	5	5	3	5	5	4	4	4	54
22	4	5	5	4	5	3	4	4	5	5	5	5	54
23	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	59
24	5	5	4	5	5	5	4	3	5	5	5	5	56
25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	59
26	4	5	5	5	4	4	5	2	5	5	4	4	52
27	3	4	5	4	2	5	5	4	5	5	5	5	52
28	4	5	5	3	5	4	3	3	5	5	4	4	50
29	3	5	5	3	4	4	4	5	5	5	4	4	51
30	3	5	4	4	3	3	4	5	5	5	4	4	49

Lampiran 4

FREQUENCY VARIABEL Y

Statistics

		Pengel olaan Keuang an	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12
N	Vali d	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Miss ing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum		1605	125	144	143	131	126	130	126	125	142	147	133	133

Y1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	8	26.7	26.7	26.7
	4	9	30.0	30.0	56.7
	5	13	43.3	43.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Y2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	1	3.3	3.3	3.3
	4	4	13.3	13.3	16.7
	5	25	83.3	83.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Y3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	7	23.3	23.3	23.3
	5	23	76.7	76.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Y4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	4	13.3	13.3	13.3
	4	11	36.7	36.7	50.0
	5	15	50.0	50.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Y5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	2	6.7	6.7	6.7
	3	4	13.3	13.3	20.0
	4	10	33.3	33.3	53.3
	5	14	46.7	46.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Y6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	3.3	3.3	3.3
	3	4	13.3	13.3	16.7
	4	8	26.7	26.7	43.3

5	17	56.7	56.7	100.0
Total	30	100.0	100.0	

Y7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	3.3	3.3	3.3
	3	5	16.7	16.7	20.0
	4	11	36.7	36.7	56.7
	5	13	43.3	43.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Y8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	2	6.7	6.7	6.7
	3	5	16.7	16.7	23.3
	4	9	30.0	30.0	53.3
	5	14	46.7	46.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Y9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	2	6.7	6.7	6.7
	4	2	6.7	6.7	13.3
	5	26	86.7	86.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Y10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	3	10.0	10.0	10.0
	5	27	90.0	90.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Y11

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	2	6.7	6.7	6.7
	4	13	43.3	43.3	50.0
	5	15	50.0	50.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Y12

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	17	56.7	56.7	56.7
	5	13	43.3	43.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

FREQUENCY VARIABEL X

Statistics

		Sistem Pengendalian Intern	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10
N	Valid	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sum	1351	144	137	135	122	144	141	127	124	140	137

X1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	6	20.0	20.0	20.0
	5	24	80.0	80.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	13	43.3	43.3	43.3
	5	17	56.7	56.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	3	10.0	10.0	10.0
	4	9	30.0	30.0	40.0
	5	18	60.0	60.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	7	23.3	23.3	23.3
	4	14	46.7	46.7	70.0
	5	9	30.0	30.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	6	20.0	20.0	20.0
	5	24	80.0	80.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	9	30.0	30.0	30.0
	5	21	70.0	70.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	6	20.0	20.0	20.0
	4	11	36.7	36.7	56.7
	5	13	43.3	43.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	7	23.3	23.3	23.3
	4	12	40.0	40.0	63.3
	5	11	36.7	36.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	10	33.3	33.3	33.3
	5	20	66.7	66.7	100.0

X9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	10	33.3	33.3	33.3
	5	20	66.7	66.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	13	43.3	43.3	43.3
	5	17	56.7	56.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Lampiran 6

OUTPUT REGRESSION

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.429 ^a	.184	.154	3.676

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Intern

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	85.122	1	85.122	6.299	.018 ^a
	Residual	378.378	28	13.514		
	Total	463.500	29			

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Intern

b. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	21.151	12.906		1.639	.112
	Sistem Pengendalian Intern	.718	.286	.429	2.510	.018

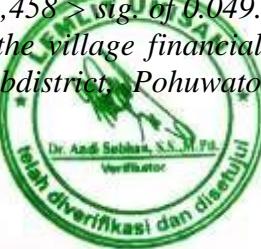
a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan

ABSTRACT

SASMITA S GELI. E2119208. THE EFFECT OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM ON THE FINANCIAL MANAGEMENT AT MALEO VILLAGE, PAGUAT SUBDISTRICT, POHuwATO DISTRICT

The role of the internal control system is very important to create an efficient, effective, and reliable government. The purpose of this study is to find and analyze the effect of the internal control system on the financial management at Maleo Village, Paguat Subdistrict, Pohuwato District. Based on the results of data processing using SPSS-16, it is found that the gained F count is $4,458 > \text{sig. of } 0.049$. It means that the effect of the internal control system (X) on the village financial management at the village (Y) of Maleo village, Paguat Subdistrict, Pohuwato District is significant by 4.458.

Keywords: internal control system, village financial management



ABSTRAK

SASMITA S GELI. E2119208. PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN PADA DESA MALEO KECAMATAN PAGUAT KABUPATEN POHuwATO

Peranan dari sistem pengendalian internal sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif dan handal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan pada Desa Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato. Dari hasil olahan data, dengan menggunakan SPSS-16 dapat diperoleh F hitung sebesar $4,458 > \text{sig.}$ sebesar 0,049 yang artinya hubungan antara sistem pengendalian internal (X) terhadap pengelolaan keuangan desa pada desa (Y) Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato sebesar 4,458 adalah signifikan.

Kata kunci: sistem pengendalian internal, pengelolaan keuangan desa



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt 3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-mail:lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 19244/PIP/LEMLIT-UNISAN/V/2022
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada YTH.
Kepala Desa Maleo Kecamatan Paguat
Di Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

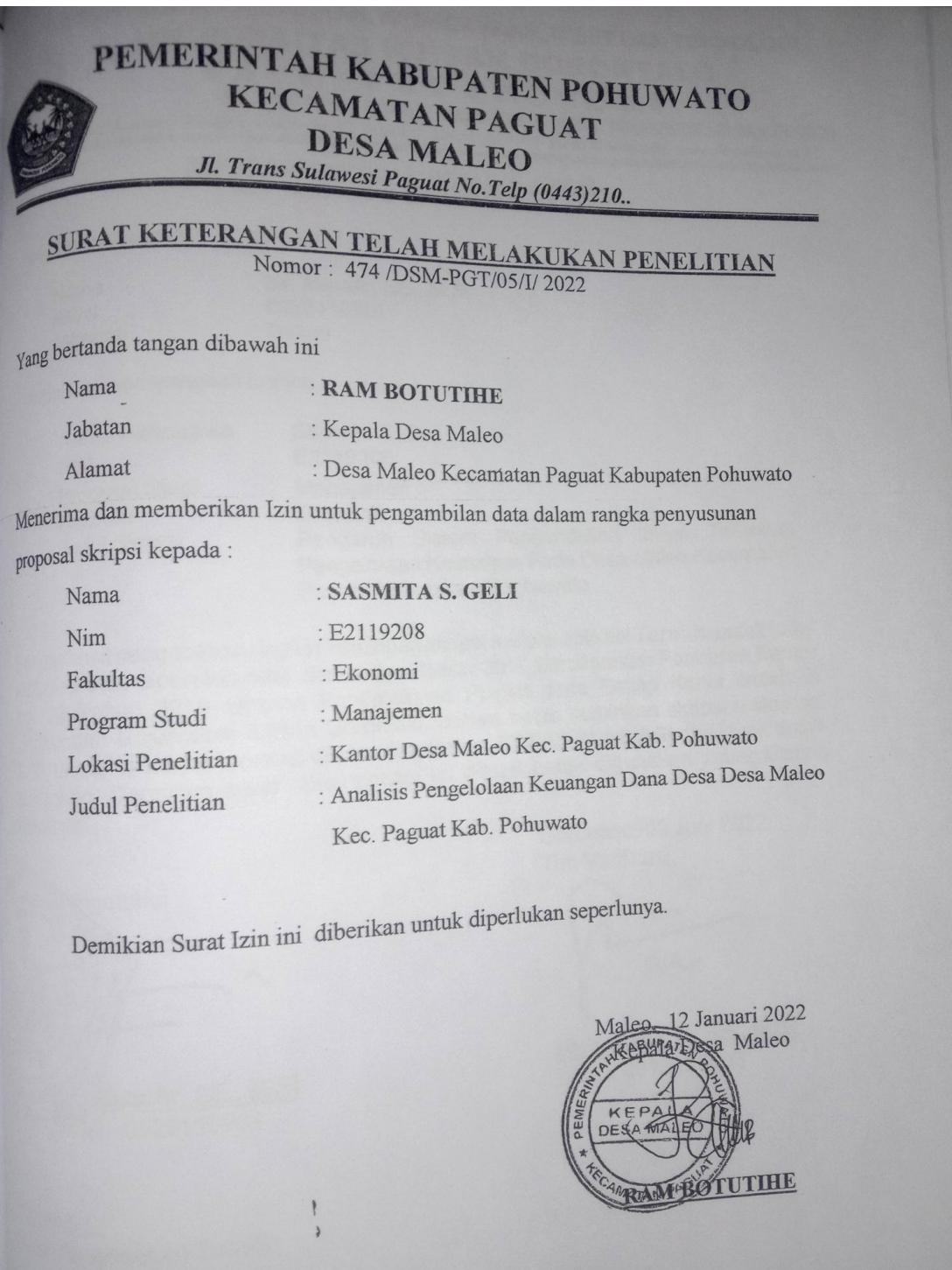
Nama : DR.Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan
proposal/skripsi, kepada:

Nama Mahasiswa : Sasmita S Geli
NIM : E2119208
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Manajemen
Lokasi Penelitian : Desa Maleo Kecamatan Paguat
Judul penelitian : Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap pengelolaan
keuangan pada desa maleo kecamatan paguat kabupaten
pohuwato.

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS EKONOMI
 SK. MENDIKNAS NOMOR 84/DIK/2001 STATUS TERAKREDITASI BAN-PT.DIKTI
 Jalan : Achmad Nadzamuddin No.17 Telp/Fax.(0435) 829975 Kota Gorontalo. www.fe.unisan.ac.id

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
 No. 129/SRP/FE-UNISAN/VII/2022

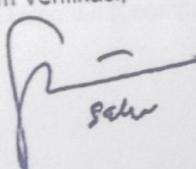
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN	:	0928116901
Jabatan	:	Dekan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa	:	Sasmita S. Geli
NIM	:	E2119208
Program Studi	:	Manajemen
Fakultas	:	Ekonomi
Judul Skripsi	:	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada Desa Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Poghuwato

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 30%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujian. Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 09 Juni 2022
 Tim Verifikasi,

 Muh. Sabir M., SE., M.Si
 NIDN. 0913088503


 DR. Musafir, SE., M.Si
 NIDN. 0928116901

Terlampir :
 Hasil Pengecekan Turnitin

turnitin

PAPER NAME
FILE skripsi Sasmita S Geli (2).docx

Similarity Report ID: oid:25211:17952907

AUTHOR
SASMITA S GELI

WORD COUNT
6954 Words

CHARACTER COUNT
41956 Characters

PAGE COUNT
43 Pages

FILE SIZE
110.5KB

SUBMISSION DATE
May 31, 2022 3:59 PM GMT+8

REPORT DATE
May 31, 2022 4:01 PM GMT+8

• 30% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 30% Internet database
- Crossref database
- 3% Submitted Works database
- 10% Publications database
- Crossref Posted Content database

• Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

turnitin

Similarity Report ID: oid:25211:17952907

• 30% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

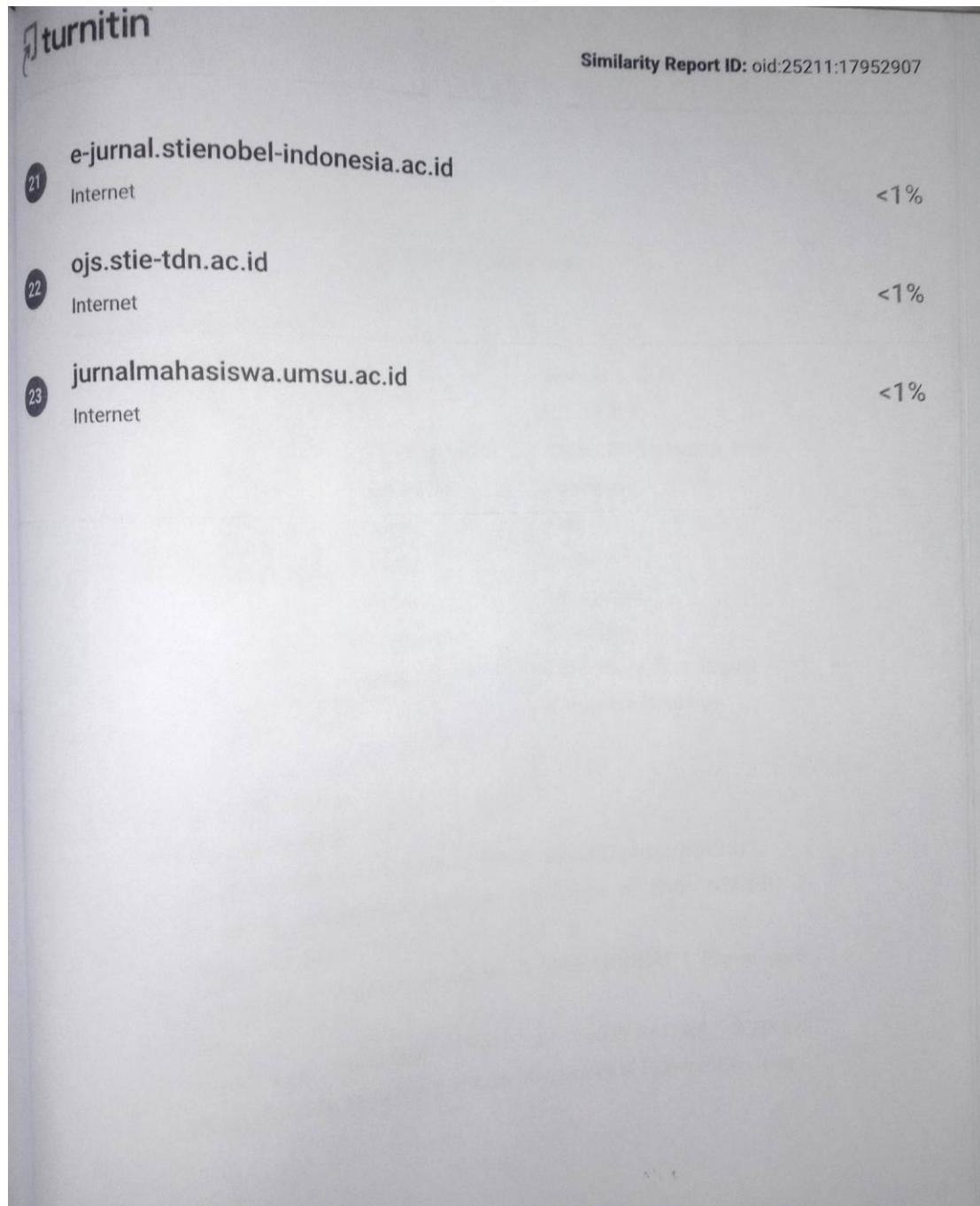
- 30% Internet database
- Crossref database
- 3% Submitted Works database
- 10% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	eprints.umm.ac.id	3%
	Internet	
2	eprints.polsri.ac.id	3%
	Internet	
3	library.binus.ac.id	2%
	Internet	
4	repo.apmd.ac.id	2%
	Internet	
5	coursehero.com	2%
	Internet	
6	ejournal.unsrat.ac.id	2%
	Internet	
7	123dok.com	2%
	Internet	
8	repository.itbwigalumajang.ac.id	2%
	Internet	

Sources overview



Lampiran 11

CURRICULUM VITAE

1. Identitas Pribadi



Nama	:	Sasmita S. Gelli
NIM	:	E21.19.208
Tempat/TglLahir	:	Paguat, 25 September 1999
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Angkatan	:	2019
Fakultas	:	Ekonomi
Jurusan	:	Manajemen
Konsentrasi	:	Keuangan
Alamat	:	Desa Maleo, Kec. Paguat Kabupaten Pohuwato

2. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

1. Menyelesaikan belajar di SDN INPRES MALEO pada tahun 2011
2. Kemudian melanjutkan kejenjang berikutnya di SMP NEGERI 2 Maleo pada tahun 2014
3. Selanjutnya menyelesaikan belajar di SMA NEGERI 1 Paguat pada tahun 2017
4. Melanjutkan Pendidikan Tinggi di UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO, Mengambil Jurusan Manajemen di Fakultas Ekonomi.

